

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA  
PUSKESMAS 4 ULU KOTA PALEMBANG**

**Skripsi**



**Nama : Muammah Faisal Shiddiq**

**NIM : 222014427**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA  
PUSKESMAS 4 ULU KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Strata Satu**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas**

**Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Muammah Faisal Shiddiq**

**NIM : 222014427**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan  
Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota  
Palembang  
Nama : Muhammad Faisal Shiddiq  
NIM : 222014427  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal

Pembimbing I,



**Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., Ak**  
NIDN/NBM: 0228115802/0121961

Pembimbing II,



**Nina Sabrina, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui  
Dekan

Ub. Ketua studi akuntansi



**Betri Sirajudin, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM : 0216106092/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Shiddiq  
NIM : 222014427  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas 4 ulu Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lainn kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang. Agustus 2019



Muhammad Faisal Shiddiq

## MOTTO

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu menang”

(QS.Al Imram : 200)

“Kalau bisa menjadi luar biasa, kenapa pilih jadi biasa”  
(Luar biasa karena usaha dan taqwa)

(Penulis)

### **Kupersembahkan kepada :**

- **Kedua orang tuaku tercinta bapak (Paiman Umar) dan ibu (Jassina) yang selalu melimpahkan doa ikhlas, mendidik dengan cinta dan kasih, serta membanting tulang membiayai pendidikanku.**
- **Adik-Adik ku yang selalu memotivasiku**
- **Ponakan ku yang selalu ku sayangi**
- **Almaterku Universitas Muhammadiyah Palembang**

## **PRAKARTA**

**Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang**” Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., Ak dan ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Terkhusus kepada yang tercinta dan saya banggakan Bapak Paiman Umar dan Ibu Jassina yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang tulus dan ikhlas
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan Karyawan.
3. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan Karyawan.
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kepala dan Seluruh pegawai Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang yang telah membantu dan memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Saudara Zahira, Faiza, Fajar, Jihan yang senantiasa memberikan doa dan bantuan baik moral maupun materi selama penyusunan skripsi ini
9. Keponakanku Harits yang selalu memberiku semangat dalam mengejar skripsi ku
10. Sahabat Seperjuangan Skripsi ku Erol, Al, Mamat, Nanda, Roby terimakasih sudah menemani memberi canda dan tawa serta semangat tiada henti

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, akhirulkalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekuranga oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukannya saya ucapkan terimakasih.

**Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Muhammad Faisal Shiddiq



## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKARTA</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. transparansi .....	11

a. Pengertian Transparansi .....	11
b. Indikator Transparansi.....	13
2. Akuntabilitas .....	14
a. Pengertian Akuntabilitas .....	14
b. Indikator Akuntabilitas.....	19
3. Anggaran .....	20
a. Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	20
b. Anggaran Dana BOK .....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Operasionalisasi Variabel .....	27
D. Data yang Diperlukan .....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisa Data dan Teknik Analisis .....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	32
1. Gambaran Umum Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang .....	32
a. Sejarah Singkat Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang .....	32
b. Letak Geografis Puskesmas 4 Ulu .....	33
c. Struktur Organisasi Puskesmas 4 Ulu .....	37
d. Visi dan Misi Puskesmas 4 Ulu .....	40
e. Ketenagaan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Puskesmas.....	41

f. Tujuan dan Sasaran Organisasi .....	46
g. Pembiayaan Kesehatan .....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
1. Transparansi Pengelolaan dana BOK .....	50
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOK .....	57

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel I.1 Laporan Anggaran Dan Realisasi Belanja Puskesmas .....	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	27
Tabel III.1 Operasionalisasi variabel .....	29
Tabel IV.1 Luas wilayah kerja puskesmas.....	33
Tabel IV.2 peta demografi .....	35
Tabel IV.3 Hasil tabulasi kuesioner informatif.....	51
Tabel IV.4 Hasil tabulasi Kuesioner keterbukaan.....	54
Tabel IV.5 Hasil tabulasi kuesioner pengungkapan.....	56
Tabel IV.6 Hasil tabulasi kuesioner akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum..	59
Tabel IV.7 Hasil tabulasi kuesioner akuntabilitas proses .....	61
Tabel IV.8 Hasil tabulasi kuesioner akuntabilitas program.....	65
Tabel IV.9 Hasil tabulasi kuesioner akuntabilitas kebijakan.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

Lampiran 1 Serfikat Hafalan Surat – surat pendek

Lampiran 2 Serfikat Toefl

Lampiran 3 Biodata Penulis

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Surat Selesai Riset

## Abstrak

### **Muhammad Faisal Shiddiq/2014427/2019/Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang.**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas 4 ulu kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas 4 ulu kota Palembang. Jenis penelitian ini ialah deskriptif. Variabel yang digunakan ialah Transparansi dan Akuntabilitas. Data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ialah angket dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian terdapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Secara keseluruhan, Puskesmas 4 ulu telah melaksanakan pelayanan umum, baik kegiatan bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis, dari hasil analisis pada puskesmas ini menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan realisasi dari anggaran dana BOK pada Puskesmas 4 ulu kota Palembang di tahun 2018 belum dikatakan baik karena masih banyaknya anggaran yang belum terealisasi, dan Keterbukaan pada puskesmas 4 ulu kota Palembang tentang bantuan operasional kesehatan belum diterapkan seperti Prosedur Pelaksanaan anggaran bantuan operasional kesehatan yang tidak boleh diketahui oleh Masyarakat, kemudian belum adanya pengungkapan yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka tentang aktivitas anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran yang dikeluarkan.

**Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Dana BOK,**

Abstract

*Muhammad Faisal Shiddiq · 2014427 · 2019 · An Analysis of Transparency and Accountability of Health Operational Assistance Budget (BOK) at Puskesmas 4 Ulu, Palembang City.*

*Formulation of the problem in this study was how the implementation of the Health Operational Assistance (BOK) budget at Puskesmas 4 Ulu Palembang. Purpose of this study was to find out the implementation of the Health Operational Assistance (BOK) budget at Puskesmas 4 Ulu Palembang. Type of this study was descriptive. Variables used were transparency and accountability. Data needed was primary data and secondary data. Data collection techniques were questionnaires and documentation. Method of analysis used was a qualitative analysis method. Result of this study contained data related to policies, programs and activities carried out. Overall, Puskesmas 4 Ulu had carried out public services, both administrative and technical activities, from the result of the analysis at this Puskesmas, it showed the level of fund transparency for implementation of BOK budget realization at Puskesmas 4 Ulu Palembang in 2018 had not been well said because there were still many unrealized budgets, and openness at Puskesmas 4 Ulu Palembang. Regarding Health Operational Assistance had not been implemented such as procedure for implementing Health Operational Assistance budget, it should not be in health known by public, then there had been no disclosure to public openly about budget activities in the form of revenues and expenditures incurred.*

*Keywords: Transparency, Accountability, BOK Funds Budget*

PENGESAHAN

NO. 594 Abstract LB/UMP/VIII / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas pelayanan adalah standar yang harus di upayakan apabila pemerintah ingin memberikan kontribusi yang maksimal pada pengguna layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi privat maupun publik. Masyarakat atau pengguna layanan jasa akan merasa di mudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi kegiatan aktifitas aparatur negara untuk memenuhi permintaan pengguna jasa, secara spesifik kegiatan tersebut merupakan metode, prosedur maupun sistem yang ada sebagai kesatuan untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan.

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma

format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintahan itu sendiri . Namun, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memberukan hasil yang memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik yang memiliki kekuatan dalam hal ini materi dan kekuasaan, yang merasa tidak terpuaskan pada akhirnya mencari jalan lain dengan cara melanggar peraturan yang ada demi mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sedangkan bagi mereka yang lemah, terpaksa menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Pada akhirnya pelayanan publik menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh aparaturnya untuk memperkaya diri. Dan dalam praktek tersebut terjadi tawar menawar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga memiliki hak untuk dilayani dan juga mengontrol kegiatan pelayanan. Ketika pelayanan publik berkembang dengan baik maka akan tercipta kepuasan pelanggan yang baik pula. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan meningkatnya stabilitas negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurut Edvarsen (2013), yang menjadi persoalan utama dalam pemberian layanan publik adalah adanya

kesulitan untuk mengawasi apakah layanan benar-benar telah sampai kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Lemahnya kinerja birokrasi juga mengakibatkan pelayanan yang seharusnya diberikan instansi atau pemerintah masih jauh dari harapan. Pelayanan publik yang ideal menurut Adam Wirahadi adalah efisien, cepat, akuntabel, murah, transparan, dan non diskriminatif. Kondisi yang nampak sekarang ini adalah tidak transparan, Transparans adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Penerapan prinsip transparansi pemerintah mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pelayanan publik yang berkualitas dilingkungan lembaga pemerintah juga dapat dilakukan dengan membudayaka konsep akuntabilitas publik. Akuntabilitas sendiri menurut Sedarmayanti(2009:105) menyebutkan bahwa akuntabilitas di tujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada

pelayanan publik. Berdasarkan pernyataan tersebut prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik ini saling berhubungan, hal ini dikarenakan bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukannya. Masyarakat sendiri sebagai penerima layanan dari pemerintah juga berhak untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Huges, yang antara lain menyatakan bahwa lembaga pemerintah sesungguhnya dibuat dan diadakan oleh publik (masyarakat), oleh karena itu para pegawai dalam lembaga pemerintahan juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pegawai lembaga pemerintah adalah mencakup semua perilaku, sikap, tindakan kerja, dan berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh publik.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu tata pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu merespon apa yang menjadi harapan, tuntunan dan keinginan masyarakatnya. Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah tersebut salah satunya ada pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini menjadi penting karena kesehatan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat disuatu daerah,

untuk itu diperlukan upaya yang maksimal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan di bidang kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan di bidang kesehatan ini diwujudkan salah satunya melalui pelayanan unit terkecil wilayah suatu daerah yang juga disebut sebagai puskesmas. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui puskesmas ini merupakan suatu cara pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, dengan memberikan bantuan untuk masyarakat melalui pemerintah dengan adanya anggaran dana BOK bagi puskesmas. Anggaran dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan bahwa penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Kesehatan Teknik (UPT) mempunyai fungsi yang amat strategis karena berada ujung tombak pelayanan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsif.

Pengelolaan DAK nonfisik dikabupaten/kota dan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat terwujud pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif untuk menghasilkan luaran

yang maksimal maka alokasi dana, BOK Puskesmas untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota Jampersal dapat digunakan untuk dukungan manajemen satuan kerja SKPD Dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas badan layanan umum daerah (BLUD) dengan besaran maksimal 5% dari alokasi yang diterima dengan pemanfaatan disusun oleh daerah dengan mengacu tugas dan fungsi serta pada ketentuan yang berlaku. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam upaya kesehatan promotif, preventif, dan mendukung pelayanan kesehatan diluar gedung dengan mendukung manajemen puskesmas yang baik, pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat

Kecamatan Seberang ulu 1 juga melaksanakan kewajibannya sebagai pemerintahan daerah dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini salah satunya diwujudkan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dalam pemberian pelayanan kesehatan, salah satu perwujudan pelayanan dalam bidang kesehatan ini adalah dibentuknya puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan.

Puskesmas 4 Ulu terletak di Kecamatan Seberang Ulu 1 tepatnya di Jalan Kyai Haji Asyik kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang Masyarakat yang ingin berobat dapat menjangkaunya dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor. Puskesmas ini dijadikan sebagai balai pengobatan untuk kesejahteraan masyarakat, Namun kenyataannya

permasalahan yang terjadi adalah unit pelayanan teknis Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang menyajikan laporan keuangan anggaran dana BOK yang tidak sesuai dengan yang di anggarkan serta banyaknya dana yang tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan sama sekali.

**Tabel I.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Puskesmas**  
**4 Ulu Kota Palembang Tahun 2018**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<b>Belanja alat Tulis Kantor</b>	-			
ATK Kegiatan	3.600.000	3.535.300	98%	64.700
ATK Penyuluhan	3.482.000	-	0%	3.482.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.150.000	1.150.000	100%	-
Belanja bahan penunjang kegiatan	7.304.800	7.112.750	97%	192.050
Belanja Kawat/Faksimili /Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.150.000	1.117.000	97%	33.000
Belanja Publikasi	1.150.000	-	0%	1.150.000
Belanja Dokumentasi	1.150.000	600.000	52%	550.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	1.150.000	-	0%	1.150.000
<b>Belanja Konsumsi</b>	-	-		-
Konsumsi Peserta Penyuluhan	5.930.000	-	0%	5.930.000
Konsumsi Peserta Rapat/ Pertemuan	1.200.000	600.000	50%	600.000
Belanja Penggantian Suku Cadang	2.300.000	2.300.000	100%	-
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.300.000	1.220.000	53%	1.080.000
Belanja Cetak	2.300.000	2.179.600	94%	120.400
Belanja Penggandaan	2.300.000	2.211.000	96%	89.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	-	-		-
Transport penyuluhan	15.500.000	1.500.000	9,6%	14.000.000
Transport ke desa sulit	-	-		-
Transport kunjungan rumah	16.498.000	-	0%	16.498.000
Transport rapat dalam kabupaten	10.000.000	9.965.000	99%	35.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>	10.000.000	670.000	6,7%	9.330.000
<b>Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan</b>	5.000.000	-	0%	5.000.000
<b>Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Mesin</b>	2.900.000	2.880.000	99%	20.000
<b>Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan</b>	12.000.000	11.817.000	98%	183.000
<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi)</b>	190.297.200	152.126.611	79%	38.170.589
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya</b>	-	-		-

<b>(Infokus)</b>				
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin (Kipas Angin)</b>	-	-		-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>	-	-		-
Pengadaan Sound System	-	-		-
AC Split	-	-		-
TV	3.000.000	-	0%	3.000.000
Kursi	1.500.000	-	0%	1.500.000
Meja		-		-
Lemari Arsip	6.000.000	-	0%	6.000.000
Penghancur kertas		-		-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer</b>	-	-		-
Note	-	-		-
Pengadaan Komputer PC	-	-		-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer)</b>	5.000.000	-	0%	5.000.000
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)</b>	-	-		-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Camera)</b>	-	-		-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan Kerja</b>	-	-		-
Alat Pemeriksa HB, Kolestrol dll	3.000.000	-	0%	3.000.000
Tensi Meter	-	-		-
<b>Kapitasi</b>	317.162.000	200.984.261	63%	116.177.739
<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)</b>	24.000.000	10.300.000	42%	13.700.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>341.162.000</b>	<b>211.284.261</b>	<b>61%</b>	<b>129.877.739</b>

Sumber: Data Anggaran Dana BOK Puskesmas 4 Ulu

Tabel I.1 menunjukkan bahwa Kegiatan dan Belanja puskesmas 4 Ulu memiliki beberapa dana yang dianggarkan tetapi tidak direalisasikan sepenuhnya. Puskesmas 4 Ulu mencantumkan beberapa kegiatan dan belanja pada laporan keuangannya seperti anggaran belanja jasa kesehatan non kapitasi sebesar Rp.24.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp.10.300.000 atau 43% dari anggaran, puskesmas juga mencantumkan transport penyuluhan Rp.15.500.000 yang terealisasi hanya Rp.1.500.000, kemudian



ada kegiatan dinas ke luar kota sebesar Rp.10.000.000 yang terealisasi hanya Rp.670.000 atau hanya 6% dari dana yang dianggarkan. Tidak hanya itu dalam laporan anggaran dan realisasi puskesmas 4 Ulu juga mencantumkan anggaran yang tidak terealisasi sama sekali seperti transport kunjungan kerumah warga, konsumsi peserta penyuluhan, kursus singkat pelatihan, belanja ATK penyuluhan, belanja pemeriksa HB dan kolestrol, belanja modal dan peralatan mesin, belanja lemari arsip, belanja tv dan kursi semua kegiatan dan belanja tersebut di anggarkan namun tidak direalisasikan. Kemudian fenomena lain terdapat anggaran belanja obat-obatan dengan terealisasi 100% dari anggaran, menurut peraturan Menteri kesehatan No 71 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Anggaran Dana BOK, anggaran Dana BOK Tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian Obat-obatan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran puskesmas tidak akuntabel dan transparan, padahal anggaran tersebut merupakan amanat bagi pemerintah yang bertujuan untuk memajukan puskesmas dan kesejahteraan masyarakat . Pengelolaan keuangan puskesmas tersebut belum sepenuhnya nampak terlihat. Peraturan menteri kesehatan No 66 Tahun 2017 telah menjelaskan bahwa puskesmas haruslah bersifat transparan, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai bagaimanakah pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang ?

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

**1. Bagi Penulis**

Dalam penelitian ini, penulis dapat mengetahui Analisis Transparansi Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang.

**2. Bagi masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi mengenai Analisis Transparansi Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang.

**3. Bagi Almamater**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan refrensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afsita Meri. 2014. *Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pdam Tirta Musi Palembang*. Jurusan Akuntansi S1 STIE MDP.
- Cenissa Sajow, Jenny Morasa. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Icih, Asro Nur Astuti. 2014. *Pengaruh Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money*. Dimensia Vol 25-66.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494.Menkes/SK/IV/2010. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indoneisa.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Uppt Stim Ykpn
- Rukayah, Nugrahini Kusumawati. 2017. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015. *Petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan*. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. *Pusat kesehatan masyarakat*. Jakarta: Menteri Kesehatan Indonesia.
- Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2016. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sujarweni. 2015. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press